

# **KOORDINASI LINGKUP ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA KUPANG**

Andreas Peni<sup>1</sup>, Leny M. Tamunu<sup>2</sup>, Wiliam Djani<sup>3</sup>

Universitas Nusa Cendana Kupang  
{Andreasazerpeni, LenyTamunu, Wiliamdjani}@gmail.com

## **ABSTRAK**

Untuk mencapai sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang, sudah seharusnya setiap perangkat daerah saling berkoordinasi dengan baik. Permasalahan koordinasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang tidak terlepas pada aspek perencanaan, buruknya perencanaan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi lingkup organisasi perangkat daerah dalam Pengembangan pariwisata di Kota Kupang. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Data terkumpul menggunakan analisis untuk mengklasifikasikan Koordinasi Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kupang/. Hasil penelitian ini Koordinasi antisipatif yang berkaitan dengan koordinasi dalam perencanaan pengembangan pariwisata Kota kupang tidak dilakukan melalui rapat koordinasi dengan berbagai OPD terkait yang mempunyai program serupa, koordinasi perencanaan yang dibangun antara Dinas Pariwisata Kota Kupang dengan Bappeda kota Kupang juga tidak berjalan dengan baik, dimana koordinasi yang terjalin hanya sebatas pada koordinasi dalam rangka penyerapan anngarannya saja tidak pada upaya koordinasi untuk mengsinkronisasikan program pengembangan pariwisata dari Dinas Pariwisata dengan program kerja serupa dari dinas lainnya dan Koordinasi Adaptif yang berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan dan juga koordinasi pemantauan, umpanbalik dan pengendalian. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata selama ini tidak ditemukan adanya koordinasi antara dinas Pariwisata Kota kupang dengan OPD lainnya. Yang terjadi adalah dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata selama ini Dinas Pariwisata melaksanakannya sendiri. Koordinasi yang terjalin antara Dinas Pariwisata Sengan Bappeda Kota Kupang hanya hanya terbatas pada koordinasi yang bersifat anggaran, bukan koordinasi dalam sinkronisasi program dengan OPD lain. Koordinasi dalam pelaksanaan promosi pariwisata Kota Kupang juga tidak ditemukan koordinasi dengan OPD dan pihak lain.

**Keywords** :*koordinasi, organisasi, pariwisata*

---

Info Artikel : Submit November 2019  
: Revisi November 2019  
: Diterima December 2019

## **1. Pendahuluan**

Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, sehingga menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar serta tercepat pertumbuhannya pada aras global. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali tetapi jumlah perjalanan wisatawan tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif (Kementerian Pariwisata, 2016). Prospek yang sangat strategis pada sector pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu nega raying memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, yang membentang dan tersebar dilebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau.

Adanya perhatian pemerintah tersebut, diikuti juga dengan meningkatnya perhatian Pemerintah Provinsi NTT terhadap pembangunan kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari *political will* yang kuat dari Pemerintah Provinsi NTT yang menetapkan pembangunan pariwisata sebagai salah satu dari 8 (delapan) agenda pembangunan di Provinsi NTT. Sebab, Provinsi NTT memiliki sumberdaya alam maupun budaya yang potensial sebagai destinasi wisata baru. Hal ini didukung dengan adanya kecenderungan perubahan pasar global yang lebih mengutamakan sumber daya alami sebagai destinasi wisata, maka potensi sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia lebih besar di bandingkan Kawasan Barat. Kualitas sumber daya alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata unggulan di Kawasan Timur Indonesia, jauh lebih baik dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan (Nirwandar, 2006).

Koordinasi sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi pemerintah yang modern dalam sudut pandang pendekatan sistem, dimana tingkat interdependensi, interrelasi, dan interaksi antar perangkat daerah maupun *stakeholder* terkait cukup tinggi untuk mencapai tujuan pemerintah daerah khususnya dalam pengembangan pariwisata. Salah satu contoh misalnya,

Dinas Pariwisata Kota Kupang dalam program kampung wisata melakukan pendampingan dan memberikan bantuan modal kepada kelompok-kelompok penun, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga memiliki program kampung industri tenun yang juga melakukan pendampingan dan memberikan modal kepada kelompok-kelompok penun. Artinya kedua dinas tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan dalam kewenangan maupun program yang dilaksanakan dan seharusnya bisa saling menunjang dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang, tetapi kenyataannya program-program tersebut masih bersifat sporadis (berjalan sendiri-sendiri). Idealnya kedua Dinas tersebut saling berkoordinasi sehingga terbentuk sinergi dalam memberdayakan kelompok-kelompok penun sebab masih banyak pengrajin tenun yang belum terjangkau pembinaannya oleh pemerintah daerah Kota Kupang. Disamping itu dalam mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang, Bappeda Kota Kupang juga merupakan bagian yang sangat penting sebagai badan yang berperan dalam perencanaan juga merupakan bagian penting dalam rangka mensinkronisasikan berbagai program dari dinas-dinas terkait,

Untuk mencapai sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang, sudah seharusnya setiap perangkat daerah saling berkoordinasi dengan baik. Permasalahan koordinasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang tidak terlepas pada aspek perencanaan, buruknya perencanaan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata kedepannya. Dalam hal perencanaan dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang terdapat permasalahan dimana dalam usaha pengembangan pariwisata ternyata Kota Kupang belum mempunyai RIPPDA, dimana RIPPDA ini akan menjadi acuan perencanaan dalam pengembangan pariwisata kedepannya. Lemahnya koordinasi dalam sisi

perencanaan ini akan berdampak bagi koordinasi yang akan dibangun dalam hal pelaksanaan dan juga pengendalian program pengembangan pariwisata Kota Kupang dimana dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kota Kupang baik itu berupa program pengembangan fisik maupun nonfisik selama ini, Dinas Pariwisata Kota Kupang melaksanakannya sendiri tanpa ada dukungan dari OPD lainnya. Permasalahannya adalah pada koordinasi yang dibangun selama ini antara Dinas Pariwisata hanya dilakukan dengan Bappeda kota Kupang, yang mana dalam koordinasinya hanya sebatas pada penyerapan anggaran saja dan tidak berkoordinasi dalam hal program pengembangan dengan OPD lain yang saling berkaitan. Dalam konteks pengembangan pariwisata ini nampaknya diantara instansi tersebut belum ada kesadaran dari pejabat yang melakukannya, hal ini terbukti dari ego sektoral yang tinggi dari masing-masing instansi terkait. Permasalahan koordinasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang seharusnya dilakukan dengan bentuk kesepakatan dan juga harus adanya komitmen dari masing-masing pihak yang berkoordinasi, tetapi pada kenyataannya kesepakatan yang dibangun lewat berbagai rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh dinas Pariwisata dengan instansi terkait belum diimplementasikan dengan baik sehingga komitmen yang awalnya telah dibangun bersama tidak dapat dilaksanakan.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Konsep Koordinasi**

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Koordinasi dapat dilakukan dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian

pekerjaan kepada para bawahan dengan demikian setiap individu/bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi yang efektif maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh individu dan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi menurut Handoko, (2003) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan- kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang- bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.Selanjutnya menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006), Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan, pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

## **2.2. Koordinasi Dalam Organisasi**

Istilah koordinasi berasal dari kata inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua akar kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi terkandung makna pengaturan.

Menurut Moonrey dan Reily dalam Manila (1996) ada tiga hal yang dapat ditemukan dalam suatu koordinasi yaitu adanya prinsip, proses, dan hasil. Yang dimaksud dengan prinsip adalah:

- a. Susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama;

- b. Penerapan prinsip kesatuan tindakan dilakukan melalui proses bertingkat secara hierarkis bergerak dari atas ke bawah berdasarkan rantai kewenangan dalam struktur organisasi;
- c. Adanya kewenangan yang merupakan kekuasaan untuk melakukan koordinasi.

Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continuiting process*) atau suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian diperlukan pengaturan usaha kelompok secara teratur karena koordinasi juga merupakan sebuah konsep yang diterapkan dalam kelompok-kelompok bukan hanya terhadap usaha individu. Dengan kata lain konsep ini diterapkan pada sejumlah individu yang bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama (*commonpurpose*) membutuhkan kesatuan usaha atau tindakan yang meminta kesadaran maupun pengertian semua individu agar ikut serta dalam pelaksanaan usaha mencapai tujuan bersama sebagai satu kelompok. Jadi kesatuan tindakan menjadi inti dari koordinasi.

### **2.3.Koordinasi Antar Organisasi**

Hubungan kerjasama dan koordinasi yang tercipta antar organisasi yang terjadi berkembang sejalan dengan perubahan yang terus terjadi yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman seperti yang digambarkan Limerick dan Cunnington. Menurut Limerick dan Cunnington (1993 dalam Keban, 2004:119) di dalam teori organisasi terdapat beberapa pola atau "*blueprint*" yang berkembang yang dimulai dari paradigma klasik (*firstblueprint*), paradigma human (*second blueprint*), paradigma system (*thirdblueprint*) dan paradigma kolaborasi (*forth blueprint*).

Pada *blueprint* pertama dirancang suatu organisasi yang berorientasi pada efisiensi tinggi dengan mengajukan sistim otoritas dan kendali yang sangat hirarkis dengan rentang yang

sangat sempit (Limerick dan Cunnington (1993, dalam Keban, 2004:119-122). Dalam aliran iniprinsip-prinsip spesialisasi, sentralisasi, dan formalitas sangat ditekankan. Namun demikian aliranyang dimotori oleh nama-nama seperti Adamsmith, Hendry Fayol, L. Gullick dan kawan-kawan ini dikritik karena memperlakukan anggota organisasi bukan sebagai manusia (kurang manusiawi) tetapi sebagai mesin. Organisasi hanya dilihat dalam proses mekanistik dimana kreativitas, inisiatif dan partisipasi anggota organisasi tidak dihargai sama sekali. Manajeryang dibutuhkan disini adalah manajer yang dianggap tahu segalanya, tegas dan berani menerapkan sanksi termasuk ancaman danbersifatotoriter.

### **Dimensi Waktu dalam Koordinasi Antar Organisasi**

Untuk memahami bagaimana pilihan koordinasi yang dilakukan dalam melaksanakan koordinasi antar organisasi maka dilihat berdasarkan dimensi waktu. Menurut Alexander (1995:36) Strategi koordinasi dimensi waktu terdiri dari koordinasi antisipatif dan strategi adaptif. Secara antisipatif adalah melihat koordinasi pada sisi perencanaan, sedangkan adaptif yaitu berupakoordinasi yang dilakukan mulai dari ketika pelaksanaan, pemantauan, umpan balik, dan pengendalian. Dalam konteks melaksanakan koordinasi di bidang tugasnya pemerintah daerah dituntun oleh perangkat aturan seperti Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 33 tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### **2.4.Konsep Pariwisata**

Dalam Undang-undang (Nomor 10 tahun 2009) tentang Kepariwisataaan dinyatakan bahwa: *Wisata* adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangkawaktu sementara (pasal1 angka1).

*Wisatawan* menurut Undang-undang (Nomor 10tahun 2009) adalah orang-orang yang melakukan wisata (pasal1 angka2). Jadi menurut pengertian pada pasal ini dapat ditafsirkan bahwa, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan seperti apa yang dikemukakan Soekadijo (2000:10) bahwa perjalanan itu bukan untuk menetap dantidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya. Dengan demikian pengertian wisata mengandung unsure bahwa perjalanan bersifat sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati dayatarik wisata.

#### **2.5. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata**

Kepariwisataaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataaan.Dengan landasan UU ini pemerintah terus berupaya menggiatkan sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengembangan pariwisata tersebut, lebih banyak difokuskan pada aspek kuantitatif yaitu seberapa besar kunjungan wisatawan, devisa, kesempatan kerja dan sebagainya. Sementara aspek kualitatif yang meliputi pembenahan sumberdaya manusia dan birokrasi/pemerintah belum menjadi fokus utama.

Adapun upaya pembenahan yang dilakukan pada aspek kualitatif masih dirasa berat sebelah dengan fokus pada penanganan sumberdaya manusia khususnya dari sisi pasar/bisnis sebagai *front liners* pariwisata. Padahal pembenahan yang hanya terfokus pada *front liners* saja tanpa memperhatikan pembenahan dari sisi pemerintah tidak akan dapat menghasilkan kinerja pariwisata yang sesuai dengan tuntutan pasar sebab kebutuhan terhadap penyusunan strategi, persoalan-persoalan manajemen dan perencanaan kepariwisataan dirasakan semakin mendesak untuk menjawab kebutuhan pengembangan pariwisata yang berdaya saing.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, berupa (1) wawancara, yaitu berupa kegiatan mewawancarai beberapa narasumber dan informan secara runtut berdasarkan instrument penelitian; (2) observasi, yaitu berupa kegiatan menentukan obyek fisik data; (3) penyampaian daftar pertanyaan /instrumen, yaitu dengan cara langsung di lapangan kepada para narasumber dan informan guna mengetahui koordinasi lingkup organisasi perangkat daerah dalam Pengembangan pariwisata di Kota Kupang (4) perekaman, yaitu merekam data yang diperoleh di lapangan; dan (5) pencatatan, yaitu mencatat secara ringkas hasil rekaman menjadi bahan tertulis.

Data dalam penelitian ini didapat secara lisan dan tulisan. Data lisan yang berupa hasil wawancara bersama narasumber dan informan, sedangkan data tertulis berupa struktur organisasi, anggaran dan buku panduan, katalog.

## **4. HASIL DAN DISKUSI**

### **4.1. Koordinasi Antisipatif antar OPD dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Kupang**

Koordinasi antisipatif ini dilihat dalam koordinasi perencanaan antar OPD dalam Pengembangan pariwisata di Kota Kupang.

#### **4.1.1. Koordinasi Perencanaan Antar OPD dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Kupang**

koordinasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang belum dilaksanakan dengan baik, masih terdapat berbagai kelemahan yang ditemui oleh peneliti salah satunya adalah koordinasi yang dibangun antara Dinas Pariwisata yang mempunyai peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata dengan Bappeda sebagai badan yang mempunyai peran dalam sinkronisasi dan harmonisasi program. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa tidak adanya koordinasi yang dibangun antara Dinas Pariwisata dengan OPD lainnya dalam usaha pengembangan pariwisata di Kota Kupang juga merupakan hal mengakibatkan proses pengembangan pariwisata menjadi terhambat. Permasalahan berkaitan dengan perencanaan dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang yang selama ini menjadi masalah paling utama adalah belum adanya RIPPDA yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata Kota Kupang.

#### **4.2.2. Koordinasi Adaptif antar OPD dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Kupang**

Koordinasi adaptif antara OPD dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang dilihat dari koordinasi pelaksanaan dan juga koordinasi pemantauan, umpan balik dan pengendalian.

##### **4.2.2.1. Koordinasi Pelaksanaan dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Kupang**

berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan promosi pariwisata di Kota Kupang oleh Dinas Pariwisata Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa masalah koordinasi dalam pelaksanaan promosi pariwisata Kota Kupang adalah pada tidakadanya koordinasi yang dibangun antara Dinas

Pariwisata dengan OPD lain juga dengan pihak lainnya. Dalam pelaksanaan promosi pariwisata saat ini, Dinas Pariwisata kota Kupang hanya mengandalkan catalog milik pemerintah Kota untuk mempromosikan objek-objek wisata di Kota Kupang yang mereka tempatkan pada beberapa tempat saja. Seharusnya Dinas Pariwisata membangun koordinasi dengan setiap OPD yang ada untuk memanfaatkan website dari semua OPD yang ada di Kota Kupang dalam rangka mempromosikan pariwisata Kota Kupang, disamping itu diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak swasta seperti Asosiasi Pariwisata (ASITA) untuk mempromosikan pariwisata Kota Kupang.

#### **4.3.2. Koordinasi Pemantauan, Umpan Balik dan Pengendalian.**

strategi koordinasi yang dijalankan dalam tahapan pemantauan, umpan balik, dan pengendalian ini pihak-pihak yang berkompeten menerapkan koordinasi yang bersifat cultural. Dengan melihat kenyataan di lapangan maka akan lebih tepat apabila dipergunakan strategi koordinasi yang menerapkan control, sehingga akan lebih pas dalam upaya pengendalian yang lebih memerlukan dukungan ketegasan yaitu berusaha selalu mengembalikan kepada tujuan dan sasaran, serta mekanisme kegiatan yang seharusnya dilakukan.

Namun demikian, hal penting dalam melaksanakan koordinasi pengendalian juga harus dilakukan sedemikian rupa sehingga di satu sisi dapat secara rutin diterima oleh pegawai yang bertugas mengendalikan, dan di lain pihak si pelapor juga mendapat kemanfaatan dari sistem pelaporan yang dilakukannya. Adanya insentif akan menjadikan kegiatan koordinasi dan

kerjasama pengendalian dapat berlangsung lebih baik seperti yang dikemukakan Kickert, Klijn dan Koppenjan (1999:9). Menurut mereka dalam hal ketiadaan insentif ini dapat merupakan penyebab bagi gagalnya sebuah kebijakan. Kondisi seperti ini sama dengan hilangnya aktor penting yang mendorong koordinasi. Oleh sebab itu perlu dikembangkan tindakan-tindakan yang

mampu menjadi insentif bagi setiap pelaksana dalam melakukan koordinasi di pelaksanaan, pemantauan, umpan balik dan pengendalian.

## **5. KESIMPULAN**

Koordinasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang yang dilihat dari koordinasi antisipatif dan koordinasi adaptif berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koordinasi antisipatif yang berkaitan dengan koordinasi dalam perencanaan pengembangan pariwisata Kota Kupang tidak dilakukan melalui rapat koordinasi dengan berbagai OPD terkait yang mempunyai program serupa, koordinasi perencanaan yang dibangun antara Dinas Pariwisata Kota Kupang dengan Bappeda kota Kupang juga tidak berjalan dengan baik, dimana koordinasi yang terjalin hanya sebatas pada koordinasi dalam rangka penyerapan angarannya saja tidak pada upaya koordinasi untuk mengsinkronisasikan program pengembangan pariwisata dari Dinas Pariwisata dengan program kerja serupa dari dinas lainnya. Koordinasi dalam tahap perencanaan juga menjadi kendala karena dalam tahap perencanaannya pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Kupang juga tidak mempunyai acuan yang jelas yang mana disebut sebagai RIPPDA. Seharusnya dalam upaya pengembangan pariwisata salah satu acuan adalah RIPPDA yang didalamnya telah memuat arah, program, tujuan, sasaran maupun kebijakan pengembangan pariwisata kedepannya.
2. Koordinasi Adaptif yang berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan dan juga koordinasi pemantauan, umpanbalik dan pengendalian. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata selama ini tidak ditemukan adanya koordinasi antara dinas Pariwisata Kota Kupang dengan OPD lainnya. Yang terjadi adalah dalam pelaksanaan program

pengembangan pariwisata selama ini Dinas Pariwisata melaksanakannya sendiri. Koordinasi yang terjalin antara Dinas Pariwisata Sengan Bappeda Kota Kupang hanya hanya terbatas pada koordinasi yang bersifat anggaran, bukan koordinasi dalam sinkronisasi program dengan OPD lain. Koordinasi dalam pelaksanaan promosi pariwisata Kota Kupang juga tidak ditemukan koordinasi dengan OPD dan pihak lain. Selama ini Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan promosi pariwisata Kota kupang hanya melalui catalog milik Dinas Pariwisata Kota saja, seharusnya Dinas pariwisata berkoordinasi dengan OPD lainnya untuk memanfaatkan website milik pemerintah untuk melakukan promosi pariwisata serta berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti ASISTA. Dalam konteks koordinasi pemantauan, umpan balik dan pengendalian disimpulkan bahwa koordinasi dalam hal pemantauan, dan pengendalian pada pembangunan pariwisata di Kota Kupang selama ini masih lemah. Kelemahan dimaksud terlihatpada tidak adanya insentif bagi pelaksana, kurang baiknya struktur organisasi, serta sikap para pelaksana yang belum mendukung. Kesemuanya menjadi bagian yang mengakibatkan lemahnya koordinasi

### **5.1. Saran**

Saran yang dapat dihasilkan untuk memperbaiki permasalahan dalam koordinasi pengembangan pariwisata Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini dinas Pariwisata Kota Kupang harus secepatnya membuat *master plan* dalam hal ini RIIPDA sebagai acuan dalam usaha pengembangan pariwisata Kota
2. Kupang sehingga program perencanaan pengembangan Pariwisata Kota Kupang dapat tersinkronisasikan dengan program dari OPD lain yang saling terkait.
3. Karena bidang pariwisata merupakan bidang yang multi sektor maka uapaya pengembangan pariwisata harus dilakukan oleh semua pihak tidak hanya mengandalkan Dinas Pariwisata saja.

Untuk itu Bappeda Kota kupang harus memainkan perennya sebagai badan perencanaan yang dapat mengkoodinir dan mengsinkronisasikan program pengembangan pariwisata dengan program dari dinas lainnya.

4. Pelaksanaan promosi pariwisata kota Kupang harus dilakukan oleh semua pihak tidak hanya dilakukan sendiri oleh Dinas Pariwisata saja. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan semua elemen pemerintah maupun swasta untuk melakukakan kegiatan promosi pariwisata kota Kupang
5. Pola pemantauan dan pengendalian harus di koordinasikan dengan baik antara Dinas Pariwisata dengan Bappeda, tidak hanya melalui pelaporan saja tetapi juga harus dilakukan lewat pemantauan langsung ke lokasi pengembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Benjamin. 2014. *Destination Management Organization (DMO) Diskursus Konsep Tata Kelola Kawasan Pariwisata Dalam Konteks Collaborative Governance Di Indonesia*. Jurnal Kepariwisata Indonesia. Vol. 9, No. 2. ISSN: 1907-9419.
- Christensen, Tom, and Laegreid, Per. 2007. *The Whole Of Government Approach To Public Sector Reform*. Public Administration Review. pp. 1059-1066.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Ahmad F, penerjemah; Saifudin ZQ, editor. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*.
- Damanik, Janianton. 2005. *Kebijakan Publik dan Praksis Democratic Governance Di Sektor Pariwisata*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 8, No. 3. pp. 331-350.
- Djese, Selsus T, et al. 2013. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Usaha Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Nusa Tenggara Timur*. Laporan. Akhir Kupang: Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.
- Effendy, O. Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. TjunA, editor. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Endhartiko. T. 2016. *Governance Synergy In Developing Sustainable Tourism In Pati Regency Indonesia*. Journal of Public Administration Studies, Vol 1, No. 1. pp. 34-45.
- Febrian, Rangi A. 2016. *Analysis Of Government Coordination Problem: Review Of Conceptual And Theoretical. The Challenges Of Social Sciences In A Changing World*. Proceedings International Conference On Social Poitics. Griffith M et al, editor. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. Ed. 2, Cet. 9. Yogyakarta: BPFE.
- Handyaningrat, Soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hasbiansyah, O. 2008. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi*. Mediator, Vol. 9, No.1. pp. 163-18
- Holzer, Marc and Schwester. 2011. *Public Administration: An Introduction*. New York: M.E. Sharpe Inc.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Jannah. L. M. 2013. *Transformasi Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia*. Disertasi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Kansil, C.S.T, dan Kansil, Christine, S.T. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusworo, Hendrie A, dan Damanik, Janianton. 2002. *Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan Untuk Pembuat Kebijakan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.6, No. 1. pp. 105-120.
- Koontz, Harold and O'Donnell, Cyril. 1978. *Essential Of Management*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company LTD.

- Lane, Jane E. 1995. *The Public Sector Concept, Models And Approaches*, London: Sage Publication.
- Lubis, S.B. Hari, dan Huseini, Martani. 2009. *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Manila. I. GK. 1997. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugraha, Mariano A.T., et al. 2015. *Model Pengembangan Berbasis Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Laporan Akhir. Kupang: Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.
- Nirwandar, Sapta. 2006. *Pembangunan Sektor Pariwisata Di Era Otonomi Daerah*. <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=22&id=1030>. Diakses 20 Mei 2017.
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rudito, Bambang, dan Famiola, Melia. 2013. *Social Mapping – Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat Atau Komuniti*. Ed. Revisi, Cet.1. Bandung: Rekayasa Sains.
- Salim, Ahmad, et al. 2011. *Potensi Dan Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Daerah Nusa Tenggara Timur*. Laporan Akhir. Kupang: Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.
- Sukarno, Frenly. 2016. *Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang Di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau*. eJournal Pemerintahan Integratif. Vol.4, No. 2. pp. 105-120. ISSN: 2337-8670.
- Sulistiyowati, et al. 1999. *Pelaksanaan Penggerakan dan Pengawasan Pengendalian di Puskesmas*. Modul Pelatihan Manajer Puskesmas. Surabaya: Kanwil Depkes Jawa Timur.
- Suradinata, Ermaya. 1994. *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perkembangan Teori dan Penerapan*, Bandung: CV. Ramadhan.
- Siagian, P. Sondang. 1995. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjandra, Riawan. 2015 Mei 18. *Evaluasi Kinerja Kementerian*. Kompas. Rubrik Opini.
- Utomo, Nugroho Adi, et al. 2001. *Anggaran Berbasis Kinerja: Tantangan Menuju Tata Kelola Kehutanan Yang Baik*. Governance Brief. Center for International Forestry Research.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Zulfikar, Muamar. 2013. *Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Alam Di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Pariwisata Indonesia 2013*.
- \_\_\_\_\_, *NTT Dalam Angka 2017*.
- Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015*.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataaan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2015-2025*.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018*.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025*.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017*.